



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 01																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Partai Enggan Diaudit BPK

**Bakal Dapat
Dana Triliunan
dari APBN**

JAKARTA - Tak semua partai politik bersedia menerima kucuran dana triliunan dari APBN. Ada beberapa parpol yang belum sepakat lantaran penggunaan dana itu akan

diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya masih menghitung biaya yang dibutuhkan par-

tai. Mulai dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan daerah di kabupaten/kota. "Bukan hanya partai di pengurusan pusat," terangnya.

Menurut dia, perwakilan sepuluh partai sudah dikumpulkan untuk membahas pendanaan itu.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 07																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Partai Enggan Diaudit BPK

Sambungan dari halaman 1

Mereka diminta memberikan masukan dan menyampaikan biaya yang selama ini dibutuhkan. Dari pertemuan tersebut, KPK bisa mendapatkan gambaran biaya yang dibutuhkan setiap partai. Tentu tidak sama biaya antara partai satu dan yang lain.

Di depan para perwakilan partai, alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu juga menyampaikan sistem pencairan dan sistem pengawasan anggaran. Dana yang diberikan tersebut berupa hibah. Jadi, anggaran dicairkan kepada DPP. Selanjutnya, mereka memberikannya kepada pengurus partai di setiap daerah. Pengawasannya akan diaudit setiap tahun oleh BPK.

Tampaknya, lanjut dia, ada beberapa partai yang berkeberatan jika harus diaudit. Terutama mereka

yang mempunyai dana besar. Tentu mereka harus mengubah keuangan partai. Itu tidak mudah. "Kalau diaudit, semua harus klar," paparnya. Selain mengaudit, pihaknya akan menyusun kode etik penggunaan anggaran dan sistem rekrutmen partai. Selama ini rekrutmen dilakukan sesuai keinginan petinggi partai. Dia belum mengetahui seperti kode etiknya karena sekarang masih dibahas.

Mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu mengatakan, dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah, partai tidak lagi mengandalkan uang dari kader. Kader tidak lagi ditekan untuk mencari uang partai. Selama ini ada kader yang melanggar hukum saat mencari uang untuk partai. Jika partai sudah didanai pemerintah, hal tersebut tidak boleh terjadi

lagi.

Rencana pendanaan untuk partai itu sudah disampaikan ke Komisi III DPR. Banyak yang menyambut baik rencana tersebut. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluh karena selama ini harus mencari uang untuk partai. Jika sudah didanai pemerintah, mereka tidak perlu lagi mencari uang. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai? Pahala mengatakan, sebelumnya muncul angka Rp 1 triliun.

Namun, angka itu hitungan kasar. Perkiraan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai bisa Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun. Jadi, setiap partai bisa mendapatkan kucuran dana Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun. Angka itu belum final dan masih terus dikaji. "Angka perkiraan sementara segitu," terangnya. Dana tersebut digunakan

untuk biaya operasional rutin dan pendidikan politik. Selama ini partai mengeluarkan dana cukup besar. Terutama saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Dana yang akan dikeluarkan akan semakin besar ketika pemilihan presiden (pilpres).

Setelah kajian pendanaan partai selesai, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah berupa rekomendasi. Jadi, pemerintah yang nanti memutuskan pendanaan. "Kami lakukan kajian dengan LIPI. Target tahun ini bisa selesai," ungkap dia.

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, kajian pendanaan partai harus cepat diselesaikan. Pihaknya tidak sabar menunggu berapa dana yang akan dikucurkan kepada partai. "Kami tentu senang kalau pemerintah menyiapkan dana untuk partai," kata politikus PKB itu. (lum/c10/oki)